



## Temuan Laporan Keuangan Meningkat

**BPK RI** Perwakilan Provinsi Kalbar mengungkapkan terjadi peningkatan atas temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester II tahun 2017. Untuk seluruh Kalbar terdapat 4.236 temuan dari 9.649 rekomendasi.

Jumlah tersebut mengalami penambahan dari hasil pemeriksaan kinerja dan PDDT semester II tahun 2017 yang telah diserahkan pada tanggal 19 Desember 2017," kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Ida Sundari.

"Ada 4.236 temuan dan

Menurutnya, dari reko-

• **Baca Halaman 15**

### Hal 9 ■ temuan laporan

mendasi yang telah diberikan BPK tersebut 7.443 diantaranya atau sebesar 70,72 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu.

Sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunan sebesar 15,36 persen.

Sementara itu, sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau mengalami peningkatan dari semester lalu yang sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16 persen.

Sedangkan sebanyak 40

rekomendasi atau sebesar 0,41 persen rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Dari hasil temuan tersebut, pihaknya melakukan penyerahan laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP) dan laporan hasil pemantauan kerugian negara/daerah kepada kepala daerah dan DPRD se-Kalbar.

Pihaknya berharap kepada para kepala daerah dapat terus berkomitmen untuk terus meningkatkan penyelesaian status rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Di dalam setiap pertemuan katanya, selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam Aplikasi Sistem In-

formasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) pemeriksaan keuangan.

Saat ini baru enam entitas yang datanya telah masuk dalam SIPTL, yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah.

"Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti adanya *double input*, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat. Kami mengharapkan agar pihak inspektorat segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi oleh Tim BPK dan datanya agar di-*scan* secara lengkap," tuturnya.

(jek/ind)